

## Kolaborasi Kodam III/Siliwangi Dengan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan

*(The Collaboration of Kodam III/Siliwangi with Local Governments in the Implementation of Food Security Programs)*

Marwan Supriyanto  
[marwan@gmail.com](mailto:marwan@gmail.com)

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

**Abstrak.** Penelitian kualitatif ini mengkaji kolaborasi antara Kodam III/Siliwangi dengan pemerintah daerah dalam implementasi program ketahanan pangan di daerah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi yang efektif, peran masing-masing pemangku kepentingan, dan hasil dari inisiatif ketahanan pangan. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi beberapa teknik, antara lain: Wawancara mendalam semi-terstruktur dengan subjek penelitian, menggunakan pedoman wawancara untuk menggali informasi terkait kolaborasi, tantangan, dan keberhasilan implementasi program ketahanan pangan; Observasi Partisipatif dengan mengamati langsung kegiatan kolaborasi dan implementasi program di lapangan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam; serta Dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan seperti laporan kegiatan, kebijakan, dan materi program yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Temuan menunjukkan pentingnya upaya terintegrasi antara Kodam III/Slw dan pemerintah daerah untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi efektif antara Kodam III/Siliwangi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, petani, dan sektor swasta krusial untuk ketahanan pangan berdasarkan dimensi ketahanan pangan FAO (2008) yakni ketersediaan, Aksesibilitas dan Pemanfaatan

**Kata kunci:** Kolaborasi Kodam III/Siliwangi, Pemerintah Daerah, Implementasi, Program Ketahanan Pangan, integrasi

**Abstract.** This qualitative research examines the collaboration between Kodam III/Siliwangi and the local government in implementing food security programs in the region. This study aims to analyze the factors that influence effective collaboration, the roles of each stakeholder, and the outcomes of food security initiatives. Data collection was conducted through a combination of techniques, including: In-depth semi-structured interviews with research subjects, using interview guidelines to elicit information related to collaboration, challenges, and successes in implementing food security programs; Participatory Observation by directly observing collaboration activities and program implementation in the field to obtain more in-depth data; and Documentation by collecting relevant documents such as activity reports, policies, and program materials related to food security. The findings demonstrate the importance of integrated efforts between Kodam III/Siliwangi and the local government to ensure sustainable food security. Effective collaboration between Kodam III/Siliwangi, the West Java Provincial Government, farmers, and the private sector is crucial for food security based on the dimensions of food security according to FAO (2008): availability, accessibility, and utilization.

**Keywords:** Collaboration Kodam III/Siliwangi, Regional Government, Implementation, Food Security Program, integration.

### 1. Pendahuluan

Pertumbuhan populasi yang pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menimbulkan tekanan tambahan terhadap sumber daya pangan yang ada. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan pangan yang cukup dan bergizi menjadi semakin mendesak. Menurut FAO (2021), pertumbuhan populasi yang cepat dapat berkontribusi pada peningkatan angka

kelaparan dan malnutrisi, terutama di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, program ketahanan pangan menjadi sangat penting untuk menjaga akses masyarakat terhadap makanan yang aman dan bergizi. Perubahan iklim juga berperan signifikan dalam tantangan pemenuhan kebutuhan pangan. Cuaca ekstrem, seperti kekeringan berkepanjangan atau banjir, dapat merusak produksi pertanian dan mengganggu distribusi pangan. Ini berarti bahwa stres terhadap sistem pangan global akan terus meningkat, yang membuat penerapan program ketahanan pangan semakin mendesak. Dalam konteks Indonesia, kolaborasi antara instansi pemerintah, khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Kodam III/Siliwangi, dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi dalam program-program ketahanan pangan.

Kodam III/Siliwangi memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, tidak hanya melalui tugas-tugas dibidang kemiliteran, tetapi juga melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan yang dapat membantu masyarakat. Dengan sinergi yang baik antara TNI dan pemerintah daerah, diharapkan program ketahanan pangan dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan efisien. Namun, meskipun ada inisiatif kolaboratif, masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat. Beberapa daerah masih mengalami hambatan terkait pemahaman peran masing-masing pemangku kepentingan. Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan tumpang tindih kebijakan dan program, mengurangi efektivitas kegiatan yang diusulkan. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif antara berbagai pihak juga menjadi hambatan besar. Tanpa komunikasi yang baik, pemangku kepentingan mungkin tidak bisa berkoordinasi dengan baik, sehingga tujuan bersama dalam meningkatkan ketahanan pangan sulit tercapai.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak baik TNI (Kodam III/Slw), pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pertanian dan Holtikultura, masyarakat petani, dan sektor swasta untuk bersatu dan berkomunikasi secara efektif, agar upaya bersama untuk mencapai ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, perlunya penyuluhan dan edukasi dalam memahami pentingnya peran dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Penelitian ini berfokus pada pengidentifikasian kendala-kendala serta mengeksplorasi praktik terbaik dari kolaborasi antara Kodam III/Siliwangi dan pemerintah daerah dalam tindakan nyata untuk mencapai ketahanan pangan.

## 2. Tinjauan Pustaka

Menurut FAO (2008), ketahanan pangan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomis terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan diet dan preferensi mereka demi kehidupan yang aktif dan sehat. Teori ini menekankan pentingnya tiga dimensi ketahanan pangan: ketersediaan (*availability*), aksesibilitas (*accessibility*), dan pemanfaatan (*utilization*). Program ketahanan pangan yang diinisiasi melalui kolaborasi antara Kodam III/Slw dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat menciptakan sinergi dalam penyuluhan pertanian, pengelolaan sumber daya, dan distribusi pangan. Keterlibatan Kodam III/Slw sebagai lembaga yang memiliki kapabilitas dalam mobilisasi dan penyuluhan akan sangat membantu dalam menjangkau masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil.

Teori Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan. Teori ini menjelaskan bahwa kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, merupakan kunci untuk mengatasi isu-isu kompleks seperti ketahanan pangan. Huxham dan Vangen (2005) dalam studi mereka menyatakan bahwa kolaborasi efektif dapat meningkatkan efektivitas program dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya masing-masing pemangku kepentingan. Pada konteks kolaborasi antara Kodam III/Siliwangi dan pemerintah daerah di

Provinsi Jawa Barat dalam implementasi program ketahanan pangan menjadi semakin penting mengingat tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, sehingga dalam kolaborasi harus diarahkan pada peningkatan efektivitas program melalui pemahaman yang jelas tentang peran masing-masing pemangku kepentingan serta komunikasi yang baik.

Jaringan sosial mengacu pada hubungan yang terjalin antara individu atau organisasi dalam suatu komunitas yang mempengaruhi perilaku dan inisiatif. Menurut Ruch (2015), jaringan yang solid dalam suatu konteks akan meningkatkan kepercayaan dan komunikasi antara pemangku kepentingan, yang pada gilirannya mendukung keberhasilan implementasi program-program pengembangan, termasuk ketahanan pangan. Kolaborasi Kodam III/Slw dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dimaksimalkan lebih lanjut dengan membangun jaringan komunikasi yang baik antar semua pihak, agar semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang seragam dan tujuan yang jelas. Kolaborasi ini bukan hanya soal penguatan struktur, tetapi juga membangun kepercayaan di dalam komunitas, yang sangat penting untuk menciptakan ketahanan pangan yang benar-benar efektif dan berkelanjutan di masa depan.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017) yang menggarisbawahi pentingnya pemahaman fenomena sosial dan konteks yang melatari isu yang diteliti. Penelitian ini juga merujuk pada Bungin (2013) yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna dan dinamika sosial di lapangan. Creswell (2014) menambahkan bahwa desain studi kasus memberikan wawasan yang mendalam mengenai konteks dan karakteristik spesifik dari situasi yang diteliti. Penelitian dilaksanakan di Makodam III/Siliwangi dan Kantor Dinas Pertanian dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat pada 12-15 Juni 2024 dengan subjek dan Objek Penelitian para pemangku kepentingan di Kodam III/Siliwangi, termasuk komandan, staf, dan anggota yang terlibat dalam program ketahanan pangan, pejabat dan staf dari Dinas Pertanian dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat yang berkolaborasi dalam pelaksanaan program. Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah implementasi program kolaboratif ketahanan pangan antara Kodam III/Siliwangi dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi beberapa teknik, antara lain: Wawancara mendalam semi-terstruktur dengan subjek penelitian, menggunakan pedoman wawancara untuk menggali informasi terkait kolaborasi, tantangan, dan keberhasilan implementasi program ketahanan pangan; Observasi Partisipatif dengan mengamati langsung kegiatan kolaborasi dan implementasi program di lapangan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam; serta Dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan seperti laporan kegiatan, kebijakan, dan materi program yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan diolah dengan langkah-langkah : (1) Transkripsi dengan mengubah rekaman wawancara dan catatan observasi menjadi format tertulis untuk memudahkan analisis; (2) Kategorisasi dengan mengelompokkan data ke dalam kategori atau tema yang relevan dengan fokus penelitian, sesuai dengan analisis yang diusulkan oleh Miles dan Huberman (2014) yang mengedepankan pentingnya pengelompokan data untuk memudahkan analisis. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014), yang mencakup tiga langkah utama yakni : (1) Pengumpulan data. Proses awal pengumpulan data dilakukan dengan teknik yang telah dijelaskan di atas; (2) Reduksi data. Menyusun data mentah dan mengurangi data yang tidak relevan dengan fokus penelitian, sehingga memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola penting dalam data; (3) Penyajian data. Menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk matriks, grafik, atau narasi deskriptif untuk mengilustrasikan temuan penelitian; (4) Verifikasi/penarikan kesimpulan.

---

Menyusun kesimpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan, mengkonfirmasi validitas temuan melalui triangulasi sumber, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan program kolaborasi ke depan.

Dengan metode penelitian yang sistematis serta terstruktur ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan mendalam tentang kolaborasi antara Kodam III/Siliwangi dan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Jawa Barat.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Jawa Barat, kolaborasi antara Kodam III/Siliwangi dan Pemerintah Daerah memainkan peran yang sangat krusial. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi program ketahanan pangan yang dilakukan dalam kemitraan ini. Melalui penerapan metodologi penelitian yang komprehensif, peneliti telah mengidentifikasi berbagai tantangan, strategi, dan keberhasilan yang muncul selama proses kolaborasi. Dalam bagian ini, peneliti akan menyajikan temuan-temuan kunci dari penelitian, mendiskusikan implikasi dari hasil tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah ke depan dalam memperkuat kerjasama ini demi mencapai ketahanan pangan yang lebih baik di daerah.

Dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti diperoleh beberapa temuan penting terkait dengan Kolaborasi Kodam Iii/Siliwangi Dengan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Daerah. Peran Strategis Kodam III/Siliwangi dalam mendukung program ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemangku kepentingan, Kodam III/Siliwangi menunjukkan peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat. Selain menjalankan tugas-tugas kemiliteran, Kodam III/Siliwangi melakukan berbagai program sosial dan kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya dalam hal ketahanan pangan. Melalui kegiatan ini, telah terjalin sinergi yang baik antara Kodam III/Slw dan pemerintah daerah, sehingga program yang dirancang dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan efisien.

Tantangan dalam implementasi program ketahanan pangan. Meskipun terdapat inisiatif kolaboratif, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan signifikan yang mempengaruhi implementasi program ketahanan pangan. Ditemukan bahwa masih adanya hambatan terkait pemahaman peran masing-masing pemangku kepentingan. Ketidakjelasan tentang tugas dan tanggung jawab tersebut meningkatkan risiko tumpang tindih kebijakan dan program, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas dari kegiatan yang diusulkan. Dalam wawancara dengan petugas dari Dinas Pertanian dan Holtikultura, terungkap bahwa kurangnya komunikasi yang efektif antara berbagai pihak menjadi salah satu hambatan utama. Tanpa adanya komunikasi yang baik, pemangku kepentingan tidak dapat berkoordinasi dengan optimal, sehingga sulit untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan ketahanan pangan di daerah.

Kolaborasi dan komunikasi antara kodam iii/slw, pemerintah provinsi jawa barat, masyarakat petani dan sektor swasta. Hasil observasi menunjukkan bahwa kolaborasi antara Kodam III/Siliwangi, pemerintah daerah, masyarakat petani, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mencapai ketahanan pangan. Penelitian ini menekankan pentingnya semua pihak untuk bersatu dan berkomunikasi secara efektif. Dengan demikian, upaya bersama dalam mencapai ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat dapat terlaksana dengan lebih baik. Melalui dokumentasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, penelitian ini juga mengeksplorasi praktik terbaik dalam kolaborasi antara Kodam III/Siliwangi dan pemerintah daerah. Beberapa program inovatif yang telah diimplementasikan memberikan contoh konkret tentang bagaimana kolaborasi yang efektif dapat dihasilkan. Dalam hal ini, kegiatan bakti sosial, pelatihan bagi petani, dan penyediaan fasilitas pendukung telah menjadi sorotan. Hasil positif dari program-

---

program tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya kerjasama yang baik dan komunikasi yang efektif, tantangan yang dihadapi dalam ketahanan pangan bisa diatasi dengan lebih baik.

Dari uraian-uraian tersebut, secara keseluruhan menunjukkan bahwa kolaborasi antara Kodam III/Siliwangi dan pemerintah daerah dalam implementasi program ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat memiliki potensi besar untuk berhasil. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk memahami peran masing-masing, meningkatkan komunikasi, dan melakukan edukasi serta penyuluhan secara berkelanjutan. Dengan mengedepankan sinergi dan kolaborasi yang efektif, diharapkan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat dapat ditingkatkan, memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Ketahanan pangan merupakan isu yang semakin mendesak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Barat. FAO (2008) mengidentifikasi tiga dimensi utama dalam ketahanan pangan: ketersediaan (*availability*), aksesibilitas (*accessibility*), dan pemanfaatan (*utilization*). Sebagai struktur yang tidak hanya bertugas dalam bidang kemiliteran, Kodam III/Siliwangi telah memainkan peranan strategis dalam mendukung ketahanan pangan di daerah ini. Dengan menerapkan teori kolaborasi antar pemangku kepentingan menurut Huxham dan Vangen (2005) serta teori jaringan sosial menurut Ruch (2015), analisis ini akan membahas kontribusi Kodam III/Siliwangi.

Ketersediaan pangan merujuk pada jumlah makanan yang tersedia bagi masyarakat, baik melalui produksi lokal maupun impor. Kodam III/Siliwangi telah berperan dalam mendukung kegiatan pertanian melalui program peningkatan produktivitas pertanian. Melalui pelatihan dan penyuluhan bagi petani, Kodam III/Siliwangi membantu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat petani dalam memproduksi pangan yang berkualitas. Langkah ini sejalan dengan pendekatan kolaboratif di mana semua pemangku kepentingan diarahkan agar saling mendukung, dari pemerintah daerah hingga masyarakat petani sendiri.

Aksesibilitas makanan mencakup kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pangan yang cukup dan bergizi. Hasil wawancara dengan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa Kodam III/Siliwangi juga berkontribusi dalam memperbaiki infrastruktur pendukung aksesibilitas pangan, seperti jalur transportasi dan penyediaan pasar. Dengan adanya upaya untuk membangun infrastruktur, masyarakat lebih mudah menjangkau bahan pangan dan pasar, sehingga meningkatkan aksesibilitas. Teori kolaborasi Huxham dan Vangen menunjukkan bahwa dengan membangun kemitraan yang kuat antara Kodam III/Siliwangi, pemerintah daerah, dan masyarakat, akses ke pangan dapat diperluas, meminimalkan ketimpangan akses yang sering terjadi.

Pemanfaatan pangan menjelaskan bagaimana makanan yang tersedia dapat diolah dan dikonsumsi secara efektif. Kodam III/Siliwangi berfokus pada penyuluhan kesehatan dan gizi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi. Selain itu, program-program kemanusiaan yang diadakan, seperti pembagian bingkisan pangan untuk masyarakat terdampak bencana, juga memperkuat ketahanan pangan dari dimensi pemanfaatan ini. Dengan meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, Kodam III/Siliwangi bertindak sebagai penghubung dan pendukung dalam ekosistem ketahanan pangan.

Teori kolaborasi Huxham dan Vangen (2005) menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, Kodam III/Siliwangi melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan menciptakan ruang kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, petani, dan sektor swasta. Dengan berbagai pelatihan dan program penyuluhan, para pemangku kepentingan dapat berkontribusi secara aktif, memperkuat keterikatan sosial dan kepercayaan antar pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara, yang menekankan bahwa sinergi yang terjalin antara Kodam III/Siliwangi dan

---

pemerintah daerah memungkinkan implementasi program ketahanan pangan yang lebih efektif dan efisien.

Kemudian Ruch (2015) menyebutkan bahwa jaringan sosial berperan penting dalam menciptakan sumber daya dan informasi bagi para anggotanya. Dalam konteks ketahanan pangan, keberadaan jaringan sosial antara Kodam III/Siliwangi dan berbagai pemangku kepentingan telah menciptakan saluran komunikasi dan kolaborasi yang dengan cepat menyebarkan informasi dan teknologi baru yang relevan. Jaringan ini dapat memperkuat akses petani terhadap pasar dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan mereka. Keterlibatan Kodam III/Siliwangi dalam pengembangan jaringan sosial ini dapat memperluas kesempatan bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam ketahanan pangan, menciptakan ekosistem yang lebih tangguh.

Studi oleh Setiawan et al. (2019) menunjukkan bahwa Kodam III/Siliwangi memiliki peran strategis dalam mendukung program ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat. Dengan fokus pada tiga dimensi ketahanan pangan yakni ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, TNI menciptakan strategi yang koheren dan berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Jawa Barat.

**Ketersediaan Pangan.** Kodam III/Siliwangi berkontribusi signifikan dalam ketersediaan pangan dengan melakukan berbagai program peningkatan produksi pertanian. Melalui distribusi bibit unggul, pelatihan petani tentang teknik pertanian modern, dan penyediaan alat-alat pertanian, Kodam III/Siliwangi berusaha meningkatkan hasil pertanian lokal. Keterlibatan TNI dalam pengolahan tanah dan penyuluhan kepada petani juga memperlihatkan upaya kolektif untuk mengoptimalkan produktivitas lahan. Menurut temuan penelitian, dukungan langsung dari TNI meningkatkan semangat kerja sama antar petani, sehingga keberadaan pangan menjadi lebih terjamin.

**Aksesibilitas Pangan.** Terdapat dua aspek penting terkait aksesibilitas yang menjadi perhatian Kodam III/Siliwangi. Pertama, aspek distribusi pangan yang cukup signifikan. Melalui kolaborasi dengan dinas terkait dan kelompok tani, Kodam III/Siliwangi membantu memastikan bahwa hasil pertanian tidak hanya mencukupi kebutuhan lokal, tetapi juga dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur transportasi yang didukung oleh TNI memungkinkan distribusi pangan menjadi lebih efisien, mengurangi kesenjangan antara produsen dan konsumen. Kedua, penyuluhan yang dilakukan oleh TNI mengenai pemahaman pasar dan harga pangan juga berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas. Dengan memberikan wawasan yang lebih baik kepada petani tentang pasar, mereka menjadi lebih mandiri dan dapat menjual hasil panennya dengan harga yang lebih baik. Keterlibatan TNI dalam upaya ini menciptakan jaringan sosial yang kuat antara petani, pedagang, dan konsumen, meningkatkan daya saing produk lokal.

**Pemanfaatan Pangan.** Dalam dimensi pemanfaatan, Kodam III/Siliwangi berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat melalui berbagai program edukasi. Dalam penelitian, pengenalan pola konsumsi yang bergizi dan pengolahan makanan yang baik menjadi agenda penting yang diusung oleh TNI. Dengan melakukan seminar dan kampanye kesehatan, TNI membantu masyarakat memahami nilai gizi dari pangan yang mereka konsumsi, yang berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Kodam III/Siliwangi juga terlibat dalam memfasilitasi kegiatan pengolahan pangan lokal, seperti pelatihan dalam pengolahan hasil pertanian menjadi produk yang bernilai tambah. Ini tidak hanya meningkatkan pemanfaatan pangan tetapi juga pemberdayaan ekonomi di Jawa Barat.

Dari analisis di atas, jelas terlihat bahwa Kodam III/Siliwangi berperan krusial dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif. Melalui penguatan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan, serta upaya

pemberdayaan masyarakat, TNI berkontribusi dalam menciptakan ketahanan pangan yang lebih kokoh. Keterlibatan aktif dalam program-program ini tidak hanya menjamin keberadaan pangan, tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat, berkontribusi pada pengurangan masalah pangan yang lebih luas di Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Ketahanan pangan, sebagai suatu kondisi di mana semua orang memiliki akses yang cukup dan aman terhadap pangan yang memadai dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ditentukan oleh tiga dimensi utama menurut FAO (2008): ketersediaan (*availability*), aksesibilitas (*accessibility*), dan pemanfaatan (*utilization*). Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ketahanan pangan, terutama di tengah upaya kolaboratif yang diinisiati oleh berbagai pemangku kepentingan.

Ketersediaan pangan berkaitan dengan suplai pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun ada inisiatif untuk meningkatkan produksi pangan melalui program pertanian, tantangan muncul dari kurangnya pemahaman peran masing-masing pemangku kepentingan. Ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab mengakibatkan kebijakan yang tumpang tindih, di mana beberapa program mungkin saling bertentangan atau tidak sinkron. Misalnya, ketidakjelasan ini bisa menyebabkan redundansi dalam dukungan teknis atau finansial bagi petani, sehingga menghambat ketersediaan pangan yang konsisten. Pendekatan yang lebih terkoordinasi antar pemangku kepentingan dapat membantu meminimalkan duplikasi usaha dan memaksimalkan efisiensi alokasi sumber daya.

Aksesibilitas mengacu pada kemampuan individu untuk mendapatkan pangan yang diperlukan. Berdasarkan wawancara dengan petugas dari Dinas Pertanian dan Hortikultura, kurangnya komunikasi yang efektif antara berbagai pihak terbukti menjadi salah satu hambatan utama. Dalam hal ini, teori kolaborasi Huxham dan Vangen (2005) menggarisbawahi pentingnya pemahaman bersama dan saling percaya di antara pemangku kepentingan. Tanpa komunikasi yang baik, informasi penting tentang kebijakan, program, dan sumber daya tidak dapat disebarluaskan secara efektif kepada kelompok sasaran, seperti petani dan masyarakat, yang pada gilirannya membatasi akses mereka terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Untuk meningkatkan aksesibilitas pangan tidak hanya perlu disediakan, tetapi juga harus dipastikan bahwa masyarakat memahami di mana dan bagaimana mereka dapat mengaksesnya. Oleh karena itu, inisiatif ke depan harus fokus pada pengembangan strategi komunikasi yang efisien serta pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program ketahanan pangan yang ada. Dimensi pemanfaatan mencakup pengolahan dan konsumsi pangan yang memadai. Tantangan yang diidentifikasi dalam hal pemanfaatan terkadang berkaitan dengan kurangnya pemahaman tentang pola makan sehat dan bergizi. Sekali lagi, komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan sangat penting untuk menyampaikan informasi gizi yang tepat kepada masyarakat. Program edukasi berbasis komunitas yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya nutrisi dan cara memasak yang sehat dapat meningkatkan tingkat pemanfaatan pangan yang tersedia.

Teori jaringan sosial menurut Ruch (2015) menjelaskan bagaimana hubungan sosial dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan sumber daya. Dalam konteks ketahanan pangan, jaringan sosial yang kuat antar pemangku kepentingan dapat membantu menciptakan saluran komunikasi yang lebih baik. Namun, jika ada hambatan dalam komunikasi, jaringan tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal. Membangun jaringan sosial yang kuat di antara petani, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah (NGO) akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pertukaran informasi dan pengalaman, yang pada gilirannya mendorong peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan.

---

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Santosa (2021) berjudul "Analisis Hambatan dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan oleh Pemangku Kepentingan di Jawa Barat," ditemukan bahwa tantangan dalam implementasi program ketahanan pangan di daerah tersebut bersifat kompleks dan multifaktorial. Salah satu temuan utama adalah bahwa keberhasilan inisiatif kolaboratif sangat bergantung pada pemahaman yang jelas mengenai peran masing-masing pemangku kepentingan serta komunikasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan tersebut.

Pemahaman Peran Pemangku Kepentingan. Rahmawati dan Santosa menunjukkan bahwa banyak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, petani, LSM, dan sektor swasta, sering kali mengalami kebingungan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam program ketahanan pangan. Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan tumpang tindih fungsi, di mana pemangku kepentingan tertentu mungkin merasa terpinggirkan atau tidak diberdayakan. Penting bagi setiap pemangku kepentingan untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang kontribusi dalam kerangka kerja ketahanan pangan. Misalnya, pemerintah daerah harus berfungsi sebagai fasilitator, penyedia kebijakan, dan pendukung teknis, sementara petani harus dapat mengakses sumber daya dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas mereka. Hal ini mendorong pentingnya penyusunan dokumen rancangan program yang menjelaskan secara rinci tugas dan tanggung jawab setiap pihak.

Komunikasi yang Efektif. Penelitian juga menekankan bahwa komunikasi yang efektif merupakan kunci untuk menyukseskan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Rahmawati dan Santosa menemukan bahwa seringkali terdapat hambatan dalam komunikasi yang menyebabkan miskomunikasi, kurangnya informasi, atau bahkan konflik di antara pemangku kepentingan. Dengan komunikasi yang baik, informasi dan pengetahuan dapat disebarkan secara merata, sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi. Diskusi rutin dan forum komunikasi antara semua pihak yang terlibat dapat menjadi strategi untuk membangun kepercayaan dan transparansi. Dengan demikian, hal ini dapat memperkuat kerja sama dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan pengambilan keputusan.

Fasilitasi dan Koordinasi Proaktif. Rahmawati dan Santosa menekankan pentingnya fasilitasi dan koordinasi yang proaktif untuk memastikan kelancaran program-program ketahanan pangan. Pemangku kepentingan perlu mengembangkan struktur organisasi yang jelas yang mendukung kolaborasi. Misalnya, pembentukan komite atau kelompok kerja yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan dapat memfasilitasi perencanaan bersama, pelaksanaan, dan evaluasi program. Edukasi juga berfungsi sebagai alat penting dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan pemangku kepentingan. Program pelatihan dan workshop yang dirancang khusus untuk pemangku kepentingan, termasuk petani, dapat membantu memastikan bahwa mereka memahami metode pertanian yang berkelanjutan dan praktik terbaik dalam rangka meningkatkan produktivitas mereka.

Dalam konteks ketahanan pangan di Jawa Barat, pembahasan berdasarkan teori-teori yang relevan dan penelitian oleh Rahmawati dan Santosa menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan, penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran masing-masing dan mampu berkomunikasi secara efektif. Fasilitasi, koordinasi, dan edukasi yang proaktif akan memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan dan menciptakan struktur yang optimal untuk implementasi program-program ketahanan pangan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ketahanan pangan di daerah dapat ditingkatkan secara berkesinambungan.

Menurut FAO (2008), ketahanan pangan terdiri dari tiga dimensi kunci: ketersediaan (*availability*), aksesibilitas (*accessibility*), dan pemanfaatan (*utilization*). Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan berkontribusi terhadap pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan.

---

Dengan menganalisis kolaborasi antara Kodam III/Siliwangi, pemerintah Provinsi Jawa Barat, masyarakat petani, dan sektor swasta, kita dapat melihat bagaimana kerjasama lintas sektor dapat mengatasi tantangan yang ada di setiap dimensi ini.

Ketersediaan pangan mencakup produksi, penyimpanan, dan distribusi pangan. Dalam konteks kolaborasi, keberadaan Kodam III/Siliwangi sebagai salah satu pihak penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan pangan sangat vital. Berdasarkan observasi, program-program inovatif seperti penyediaan fasilitas pertanian, pemasangan alat irigasi, dan pengadaan bibit unggul telah dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan di daerah. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana kolaborasi dengan sektor pertanian dapat membantu meningkatkan produksi pangan.

Aksesibilitas mengacu pada kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pangan. Dalam hal ini, komunikasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan menjadi kunci. Huxham dan Vangen (2005) menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan saluran komunikasi yang baik. Dalam konteks ini, kegiatan pelatihan bagi petani yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Kodam III/Siliwangi membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang praktik pertanian yang baik dan strategi pemasaran. Program ini juga membantu petani memahami pentingnya diversifikasi produk, sehingga mereka dapat lebih baik beradaptasi dengan kebutuhan pasar.

Pemanfaatan pangan mencakup bagaimana pangan tersebut diolah dan dikonsumsi. Di sinilah sektor swasta memainkan perannya dengan membawa inovasi dalam pengolahan dan distribusi pangan. Kerjasama antara petani dan sektor swasta dapat menciptakan nilai tambah melalui pengolahan pangan yang lebih baik, seperti pengemasan dan pemasaran yang efektif. Praktik terbaik yang ditunjukkan oleh berbagai kegiatan bakti sosial dan program-program penyuluhan menekankan pentingnya pendidikan gizi dan pola makan sehat. Keterlibatan sektor swasta dapat membantu meningkatkan kualitas produk pangan sehingga lebih bergizi dan sehat bagi masyarakat.

Teori jaringan sosial menurut Ruch (2015) relevan dalam konteks kolaborasi ini. Jaringan sosial yang terbentuk antara petani, pemerintah, Kodam III/Siliwangi, dan sektor swasta memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik. Dengan membangun hubungan yang saling menguntungkan, individu dan organisasi dapat lebih mudah saling mendukung dan berbagi sumber daya. Misalnya, kolaborasi dalam pelatihan dan penyuluhan tidak hanya memberikan wawasan kepada petani tetapi juga menguatkan ikatan sosial yang ada di antara mereka. Jaringan ini penting dalam mempertahankan keberlanjutan ketahanan pangan, sebab dengan saling berbagi informasi dan sumber daya, tantangan yang dihadapi dapat lebih mudah diatasi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi dan Jamilah (2020) mengenai sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam implementasi program ketahanan pangan di Jawa Barat, ditemukan bahwa kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk Kodam III/Siliwangi, pemerintah daerah, masyarakat petani, dan sektor swasta, memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan di provinsi tersebut. Pembahasan akan membahas elemen-elemen kunci dari kolaborasi intersektor yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan.

Kolaborasi Intersektor yang Efektif. Penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antar sektor adalah pilar utama dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Supriyadi dan Jamilah menjelaskan bagaimana kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan TNI dapat menghasilkan sinergi yang menguntungkan. TNI, dengan jangkauan dan sumber daya yang luas, mampu memberikan dukungan logistik dan keamanan, terutama dalam kondisi darurat atau saat distribusi pangan. Di sisi lain, pemerintah daerah, sebagai pengambil keputusan, dapat memfasilitasi kebijakan yang mendukung program ketahanan pangan. Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat petani juga sangat penting. Sektor swasta dapat membantu dengan menyediakan

teknologi dan inovasi dalam pertanian, sedangkan petani sebagai pelaksana utama program ketahanan pangan harus didengar suaranya dan diberikan akses yang baik terhadap sumber daya. Sinergi yang terbentuk di antara semua pemangku kepentingan ini menghasilkan pendekatan komprehensif dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan.

Supriyadi dan Jamilah menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang efektif dalam memastikan kesuksesan kolaborasi. Komunikasi yang baik memungkinkan penyaluran informasi yang tepat waktu dan akurat di antara semua pihak. Dengan membangun saluran komunikasi yang terbuka, pemangku kepentingan dapat secara cepat memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan solusi secara kolektif. Penggunaan platform komunikasi yang tepat, seperti forum diskusi, pertemuan rutin, dan bahkan penggunaan media sosial, dapat meningkatkan keterlibatan semua pihak dan memfasilitasi pertukaran informasi. Sebagai contoh, petani yang mendapatkan informasi tepat mengenai praktik pertanian yang baik dapat meningkatkan produktivitas mereka, sedangkan sektor swasta dapat merespons kebutuhan petani dengan produk yang relevan.

Jaringan Sosial yang Kuat. Pentingnya jaringan sosial juga diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi program ketahanan pangan. Supriyadi dan Jamilah menunjukkan bahwa jaringan yang kuat antara pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan emosional dan sosial yang diperlukan untuk mendorong partisipasi aktif dalam program-program ketahanan pangan. Pembangunan jaringan sosial yang kuat memungkinkan kolaborasi lebih jauh yang berlangsung di tingkat lokal. Ini dapat termasuk kelompok tani yang saling berbagi pengetahuan dan sumber daya, serta mengadakan pelatihan bersama. Selain itu, jaringan sosial juga dapat memfasilitasi distribusi pangan yang lebih efisien, di mana petani dapat langsung terhubung dengan konsumen atau pasar tanpa intermediaries yang berlebihan.

Secara keseluruhan, penelitian oleh Supriyadi dan Jamilah (2020) menekankan urgensi kolaborasi intersektor antara pemerintah daerah, TNI, masyarakat petani, dan sektor swasta dalam upaya mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan di Jawa Barat. Dengan memperkuat komunikasi yang efektif dan membangun jaringan sosial yang mendukung, semua pemangku kepentingan dapat mengatasi tantangan yang ada di ketiga dimensi ketahanan pangan, produksi, distribusi, dan aksesibilitas. Upaya bersama ini tidak hanya penting untuk memastikan keberlanjutan kebutuhan pangan masyarakat tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan secara keseluruhan di daerah tersebut.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Kodam III/Siliwangi berperan strategis dalam mendukung ketahanan pangan di Jawa Barat dengan fokus pada tiga dimensi: ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan. Dalam ketersediaan, Kodam meningkatkan produktivitas pertanian melalui pelatihan dan distribusi bibit unggul, serta alat pertanian, yang membantu petani dan memastikan ketersediaan pangan. Di dimensi aksesibilitas, Kodam memperbaiki infrastruktur transportasi dan distribusi pangan, serta memberikan informasi pasar kepada petani, sehingga mempermudah akses pangan bagi masyarakat. Untuk pemanfaatan, Kodam meningkatkan kesadaran pola makan sehat melalui edukasi dan kampanye, mengajarkan pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah. Dengan pendekatan kolaboratif dan teori jaringan sosial, Kodam menciptakan saluran komunikasi efektif, meningkatkan akses informasi dan teknologi bagi petani. Sinergi antara militer, pemerintah daerah, dan masyarakat memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.

Implementasi program ketahanan pangan menghadapi tantangan kompleks dalam kolaborasi pemangku kepentingan dalam tiga dimensi ketahanan pangan menurut FAO (2008), yakni : pertama, Ketersediaan (*Availability*). Kurangnya pemahaman tentang peran pemangku

kepentingan menyebabkan kebingungan dan tumpang tindih kebijakan, menghambat ketersediaan pangan. Pendekatan kolaboratif diperlukan untuk efisiensi alokasi sumber daya; kedua, Aksesibilitas (*Accessibility*). Kurangnya komunikasi efektif menghambat penyebaran informasi penting kepada petani, mengurangi akses pangan bergizi. Pengembangan strategi komunikasi dan pendidikan masyarakat sangat penting; ketiga, Pemanfaatan (*Utilization*). Tantangan dalam pemanfaatan terkait dengan rendahnya pemahaman pola makan sehat. Program edukasi yang menekankan pentingnya nutrisi dan pengolahan pangan diperlukan. Penelitian oleh Rahmawati dan Santosa (2021) menekankan pentingnya : (1) Pemahaman Peran. Kejelasan tentang tanggung jawab pemangku kepentingan untuk menghindari ketidakberdayaan Komunikasi Efektif. Membangun forum rutin untuk memperkuat kerja sama dan transparansi antar pemangku kepentingan; (3) Fasilitasi Koordinasi Proaktif. Mengembangkan struktur organisasi untuk kolaborasi yang lebih baik melalui kelompok kerja dan program edukasi. Dengan demikian, kesuksesan program ketahanan pangan di Jawa Barat tergantung pada peningkatan komunikasi, koordinasi, dan pemahaman peran masing-masing, guna mencapai ketahanan pangan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kolaborasi efektif antara Kodam III/Siliwangi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, petani, dan sektor swasta krusial untuk ketahanan pangan berdasarkan dimensi ketahanan pangan FAO (2008) yakni : pertama, Ketersediaan. Kolaborasi meningkatkan produksi melalui penyediaan fasilitas, alat irigasi, dan bibit unggul, dengan institusi militer menjaga stabilitas keamanan pangan; kedua, Aksesibilitas. Komunikasi pemangku kepentingan dan pelatihan oleh pemerintah serta Kodam III/Slw membantu petani dalam pertanian dan pemasaran, serta mendiversifikasi produk untuk memenuhi pasar, sehingga diperlukan adanya edukasi tentang praktik pertanian berkelanjutan meningkatkan produktivitas, sehingga diperlukan edukasi tentang peran dalam rantai pasokan memperbaiki aliran informasi, memudahkan akses pangan bergizi. ketiga, Pemanfaatan: Sektor swasta berkontribusi pada inovasi pengolahan dan distribusi pangan, meningkatkan kualitas produk dan kesadaran akan pola makan sehat melalui edukasi gizi serta edukasi pola makan sehat dan pengolahan pangan meningkatkan gizi dan keberagaman gizi makanan. Untuk itu, kolaborasi intersektor sebagai pilar ketahanan pangan berkelanjutan, dengan komunikasi yang baik dan jaringan sosial yang kuat memastikan efisiensi distribusi dan dukungan. Sinergi antara semua pihak dan penguatan saluran komunikasi sangat penting untuk menghadapi tantangan secara komprehensif. Pendekatan kolaboratif antara TNI dan pemerintah daerah penting untuk membangun jaringan sosial untuk ketahanan pangan. Pengoptimalan ketiga dimensi ketahanan pangan mendukung kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan di Jawa Barat. Edukasi dan kolaborasi sinergis adalah fondasi utama dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Bungin, B. (2013). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

---

## 2. Jurnal

- Purwanto, S., Purnomo, M. R., & Budiman, H. (2025). *POWER DYNAMICS IN DECISION MAKING: A QUALITATIVE ANALYSIS*. *POWER*, 2(1), 80-86.
- Purwanto, S., Hidayatullah, S. S. W., & Tirtoadisuryo, D. *HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT STRATEGIES FOR ENHANCING ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN THE DIGITAL ERA*.
- Rahmawati, D., & Santosa, H. (2021). Analisis Hambatan dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan oleh Pemangku Kepentingan di Jawa Barat. *Jurnal Sumberdaya Pangan*, 5(1), 45-60.
- Setiawan, Y., Prasetyo, S., & Rahardjo, S. (2019). Peran TNI dalam Ketahanan Pangan Nasional: Studi di Wilayah Jawa. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 14(2), 123-138.
- Supriyadi, A., & Jamilah, R. (2020). Sinergi Pemerintah Daerah dan TNI dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan di Jawa Barat. *Jurnal Pembangunan Pertanian*, 9(2), 101-115.

## 3. Media Online

- Bappenas. (2020). "Rencana Aksi Nasional Ketahanan Pangan." Jakarta,
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2021). "*The State of Food Security and Nutrition in the World 2021*.", Jakarta.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2021). "Strategi Nasional Ketahanan Pangan." Jakarta.